

# DISPARITAS REGIONAL DAN KONFLIK PILKADA ACEH 2012

Fadjri Alihar

## *Abstract*

*Aceh's governor election 2012 is an interesting phenomenon, which was two former leaders of GAM of two different parties run for the election. Those two leaders were Zaini Abdullah and his running mate Mazakir Manaf, and Irwandi Yusuf and his running mate Muhyan Yunan. Fortunately, Zaini Abdullah and Muzakir Manaf had won the election by 56%, while Irwandi Yusuf and his running mate Muhyan Yunan had just voted by 29% voter from all districts of Aceh. Similarly, in each regencies in Aceh, at least in 11 districts out of 18, this election had also voted for mayors and/or head of districts' candidates who came from Partai Aceh. After lost in the election, Irwandi Yusuf, one of the governor's candidate declared Partai Nasional Aceh (PNA), as his political vehicle. Any violence happened during Aceh's governor election 2012 supposedly would not have gone into any further deterioration. It is due to the sense of keeping the MoU Helsinki in correct order.*

**Keyword:** Local election, GAM, violence, MoU Helsinki, conflict

## **Abstrak**

Pilkada Aceh 2012 mempunyai fenomena yang menarik karena dua orang tokoh GAM maju sebagai calon gubernur, tetapi dengan perahu yang berbeda. Pilkada Aceh 2012 akhirnya dimenangkan secara telak oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan jumlah suara 56 persen, sementara pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju melalui jalur independen hanya memperoleh suara 29 persen. Pilkada Aceh 2012 pada tingkat kabupaten/kota juga dimenangkan oleh calon-calon bupati/Wali kota yang didukung Partai Aceh pada 11 daerah dari 18 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Setelah mengalami kekalahan, Irwandi Yusuf mendirikan Partai Nasional Aceh (PNA) sebagai kendaraan politiknya. Kekerasan yang terjadi pada saat Pilkada Aceh 2012 kiranya tidak akan berlarut-larut karena masing-masing pihak tidak ingin mencederai MoU Helsinki yang telah berhasil membawa perdamaian di Aceh.

**Kata kunci:** Pilkada, GAM, kekerasan, MoU Helsinki, konflik

## **Pendahuluan**

Sejak nota kesepakatan (MoU) Helsinki ditandatangani tanggal 5 Agustus 2005, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menyelenggarakan dua kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Yang pertama, Pilkada Aceh diselenggarakan pada bulan April 2006 kurang lebih setahun setelah ditandatanganinya MoU Helsinki, dan yang kedua Pilkada Aceh diselenggarakan pada tanggal 9 April 2012.

Kedua pilkada tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada saat pilkada tahun 2006 terlihat penyelenggaraannya relatif berlangsung secara damai jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2012. Pilkada tahun 2006 sebenarnya juga tidak terlepas dari berbagai tindakan intimidasi, namun tidak sampai meng-

ganggu proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Di samping itu, tidak ada sengketa pilkada yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), baik pada tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati.

Sebaliknya, ketika Pilkada Aceh 2012 berlangsung untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ternyata diwarnai dengan berbagai pertikaian yang menjurus ke arah konflik horizontal. Pada Pilkada 2012, ada dua kubu yang berseberangan dan keduanya berasal dari mantan anggota GAM yaitu, *pertama*, kubu Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh melalui jalur independen. *Kedua*, kubu Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf masing-masing sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Majunya kedua elite mantan GAM ini dikawatirkan oleh beberapa kalangan akan mengulang sejarah konflik Aceh. Hal ini mengingat tingginya intensitas insiden yang melibatkan dua kelompok yang bersaing, yaitu kubu Irwandi Yusuf dan kubu Partai Aceh. Insiden demi insiden terus terjadi dalam keseharian mulai dari pemukulan, pembakaran, dan penembakan mobil hingga pembunuhan. Salah seorang Tim Sukses (TS) yang dikenal dekat dengan Irwandi Yusuf tewas ditembak oleh orang-orang tidak dikenal (OTK).<sup>1</sup>

Pilkada Aceh 2012 untuk tingkat gubernur dimenangkan secara spektakuler oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan jumlah suara sebanyak 56%, sementara Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan hanya memperoleh suara 29%. Dengan demikian, pemilihan gubernur Aceh berlangsung satu putaran karena suara yang diperoleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf melebihi 33%.

Dalam Pilkada Aceh 2012 ternyata banyak sekali pasangan yang kalah mengajukan gugatan ke MK, baik pada pemilihan gubernur maupun pada pemilihan bupati/Wali kota. Pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan mengajukan gugatan ke MK dengan alasan terjadinya intimidasi secara masif pada saat berlangsungnya Pilkada Aceh 2012.<sup>2</sup> Demikian pula ada 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengajukan gugatan ke MK dengan berbagai alasan.<sup>3</sup>

Puncak dari eskalasi perseteruan antara kelompok Irwandi Yusuf dan Partai Aceh terjadi ketika dilantiknya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh definitif. Pada saat pelantikan tersebut terjadi pemukulan terhadap Irwandi Yusuf oleh anggota Partai Aceh. Irwandi Yusuf merasa kecewa terha-

dap pihak kepolisian yang tidak serius mengusut kasus pemukulan tersebut,<sup>4</sup> sehingga untuk sementara waktu Irwandi Yusuf mengasingkan diri ke Malaysia.<sup>5</sup>

Setelah kalah dalam Pilkada Aceh 2012, Irwandi Yusuf mendirikan Partai Nasional Aceh (PNA). Partai tersebut didirikan untuk menampung para mantan anggota GAM yang berpihak kepada Irwandi Yusuf selama berlangsungnya Pilkada Aceh 2012. Dengan adanya dua kelompok mantan anggota GAM yang bernaung di bawah dua orang pimpinan yang berbeda, menimbulkan pertanyaan, apakah gubernur Aceh terpilih dapat merangkul para pihak yang tersisih dalam Pilkada Aceh 2012, terutama demi menjaga perdamaian yang telah diamanatkan MoU Helsinki.

Tulisan ini mencoba mengkaji relasi disparitas regional dalam kaitannya dengan Pilkada Aceh pada tahun 2006 dan 2012. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana disparitas regional berpengaruh terhadap para pemilih dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya, akan dilihat pula perubahan pilihan di antara para pemilih dalam dua periode pilkada tersebut. Apakah tidak ada perubahan yang berarti atau terjadi pergeseran orientasi para pemilih?

## **Penduduk dan Disparitas Sosial**

Jumlah penduduk Aceh ternyata tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Luas wilayah Aceh sebesar 58.376 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 4,5 juta jiwa pada tahun 2010. Dengan demikian, kepadatan penduduk relatif jarang, yaitu hanya 77 jiwa per kilometer persegi. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu 3.654 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Gayo Lues yang hanya 14 jiwa per kilometer persegi.<sup>6</sup>

Sebaran penduduk juga sangat bervariasi, terutama antara pantai barat dan timur Aceh serta daerah pedalaman. Hampir separuh penduduk

<sup>1</sup> *Serambi Indonesia*, "Dalam Dua Pekan, 40 Kekerasan Terjadi di Aceh", 3 April 2012.

<sup>2</sup> [http://www.acehkita.com.berita/putusan\\_akhir\\_MK\\_soal\\_Pilkada](http://www.acehkita.com.berita/putusan_akhir_MK_soal_Pilkada), 3 April 2012, diakses pada tanggal 3 April 2012.

<sup>3</sup> Alasan yang menarik diajukan calon bupati dan wakil bupati yang kalah dalam Pilkada Aceh Singkil untuk menggugat bupati dan wakil bupati pemenang pilkada ke MK, dengan alasan mereka sebelumnya dianggap pernah menjalani hukuman tanpa mengumumkannya ke publik. Gugatan calon bupati dan wakil bupati yang kalah tersebut ditolak oleh MK karena tidak terbukti dalam persidangan.

<sup>4</sup> *Kompas*, 25 Juni 2012.

<sup>5</sup> Menjelang Idul Fitri 2012 Irwandi Yusuf kembali ke Aceh.

<sup>6</sup> [http://www.worddfriend.web.id/indonesia/provinsi\\_nanggroe\\_aceh\\_darussalam](http://www.worddfriend.web.id/indonesia/provinsi_nanggroe_aceh_darussalam), diakses 5 Juli 2012

Aceh terkonsentrasi di daerah pantai timur yang jumlahnya sekitar 2,2 juta jiwa. Kabupaten-kabupaten yang mempunyai kontribusi jumlah penduduk terbesar, yaitu Kabupaten Aceh Utara (530 ribu jiwa), Kabupaten Biruen (390 ribu jiwa), Kabupaten Pidie (380 ribu jiwa), dan Kabupaten Aceh Timur (360 ribu jiwa).<sup>7</sup>

Secara sosiologis masyarakat Aceh terdiri atas beberapa suku bangsa. Namun, suku bangsa yang paling dominan berdomisili di Aceh adalah Suku Aceh. Sebagian besar Suku Aceh berdomisili di pesisir pantai timur Aceh mulai dari Kabupaten Aceh Pidie hingga Tamiang. Suku Aceh merupakan kelompok masyarakat yang suka merantau. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang maju karena selalu berinteraksi dengan dunia luar.<sup>8</sup>

Suku bangsa lainnya yang mendiami wilayah Aceh antara lain adalah Suku Gayo yang hidup di daerah pedalaman Aceh Tengah. Selanjutnya, dikenal juga Suku Aneuk Jamee yang berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan. Suku bangsa lainnya adalah suku Tamiang yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Suku Sinabang dan Simeulue yang berdiam di wilayah Kabupaten Simeulue.

Pada saat terjadinya konflik, wilayah Aceh terbagi dalam tiga bagian, yakni daerah merah, abu-abu, dan putih. Wilayah merah dikategorikan daerah yang selalu dilanda konflik, seperti kawasan pesisir pantai timur Aceh. Wilayah abu-abu dikenal sebagai daerah dengan intensitas konflik yang rendah, seperti wilayah pesisir pantai barat Aceh. Sementara daerah putih merupakan daerah tidak tersentuh oleh konflik, seperti daerah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Singkil.

Masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai timur dan barat Aceh mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama dari segi sosial ekonomi. Masyarakat pesisir pantai timur Aceh relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya di Aceh. Hal ini mengingat kualitas SDM masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai

timur Aceh juga cukup tinggi, terutama dari segi pendidikan. Dalam setiap pilkada, khususnya pemilihan gubernur, selalu dikuasai Suku Aceh yang berasal dari pantai timur Aceh. Selain itu, banyak posisi penting dalam birokrasi Pemda Provinsi Aceh juga dikuasai oleh Suku Aceh.

Daerah pesisir pantai timur Aceh merupakan urat nadi perekonomian karena merupakan jalur utama transportasi yang menghubungkan Kota Banda Aceh dan Medan. Dengan demikian, daerah tersebut menjadi daerah terbuka yang mampu membuka wawasan masyarakatnya, terutama dalam menyerap berbagai informasi kemajuan secara cepat.<sup>9</sup> Di samping itu, beberapa daerah di pesisir pantai timur Aceh merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, seperti gas alam cair. Sementara pesisir pantai barat dan pedalaman Aceh merupakan daerah yang terisolasi, terutama sebelum tahun 1990-an.

Pada awal tahun 2000 muncul ide pembentukan Provinsi ALA (Aceh Leuser Antara) sebagai respons terhadap kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Aceh terhadap daerah-daerah yang berada di pedalaman, seperti Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Tidak lama kemudian, masyarakat di pesisir pantai barat Aceh juga memproklamkan pembentukan Provinsi ABAS (Aceh Barat Selatan). Daerah-daerah yang tergabung di dalam ABAS, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Simeulue. Beberapa alasan utama yang dikemukakan dalam pembentukan Provinsi ALA dan ABAS, antara lain adalah memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Ketika Ibrahim Hasan pertama kali menjabat Gubernur Aceh, salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus adalah wilayah pantai barat Aceh. Hal ini mengingat selama ini daerah tersebut relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya, khususnya dengan wilayah pantai timur Aceh. Jalan-jalan di pantai barat Aceh kondisinya sangat buruk dan bahkan ruas jalan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mukhtar Naim, "Merantau: Minangkabau Voluntary Migration", *disertasi doktor*, (Singapura: Department of Sociology, University of Singapore, 1973).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Thung Ju Lan dkk, *Penyelesaian Konflik Aceh: Aceh dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI, 2006).

mulai dari Banda Aceh hingga ke Singkil terdapat sekitar 20 rakit yang harus dilalui. Pemikiran Ibrahim Hasan ketika itu sederhana sekali bahwa untuk memajukan perekonomian Aceh harus didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Selama ini yang diperhatikan hanya wilayah bagian timur Aceh karena kaya dengan sumber daya alam, seperti gas alam cair (LNG-*Liquid Natural Gas*), sedangkan bagian pantai barat Aceh dibiarkan merana dengan keterisolirannya. Padahal potensi sumber daya daerah pantai barat Aceh juga tidak kalah menarik karena banyak yang belum dieksplorasi secara optimal. Dewasa ini, pantai barat Aceh dengan potensi perkebunan kelapa sawitnya semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sementara kejayaan gas alam cair (LNG) di Kabupaten Aceh Utara telah berakhir sejalan semakin berkurangnya cadangan yang dikandung.

Belum lagi masa jabatan pertama Ibrahim Hasan sebagai gubernur habis, jalan-jalan di pantai barat Aceh telah selesai dibangun dan mulai berfungsi. Rakit-rakit yang dulunya menjadi kendala sekarang berganti dengan jembatan rangka baja yang melintasi berbagai sungai yang lebarnya hingga ratusan meter. Jika dulu jarak tempuh antara Kota Banda Aceh dan Singkil melalui jalur pantai barat dibutuhkan waktu sekitar tiga hari namun sekarang hanya dibutuhkan waktu kurang dari 15 jam. Kejelian Ibrahim Hasan mengembangkan pantai barat Aceh harus diakui karena dengan terbukanya daerah tersebut perekonomian Aceh secara keseluruhan semakin berkembang dan maju.

Jalan-jalan dan sejumlah jembatan yang pernah dibangun oleh Ibrahim Hasan pada dekade 1990-an di daerah pantai barat Aceh hancur berantakan ketika terjadinya bencana tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004. Sebagian besar jalan-jalan tersebut menjadi lautan, sementara jembatan-jembatan yang semula dibangun sangat kokoh sekarang tinggal puing-puing belaka. Namun, sarana transportasi darat di daerah pantai barat Aceh dewasa ini telah pulih kembali dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Sejalan dengan itu, berbagai sumber daya alam di daerah pantai barat Aceh mulai ditemukan dan dieksploitasi, seperti batu

bara dan pasir besi. Perekonomian di daerah pantai barat Aceh semakin berkembang sejalan dengan banyaknya investor yang menanamkan modal di daerah tersebut.

Selanjutnya secara geografis, wilayah Provinsi NAD terbagi atas tiga kawasan, yaitu kawasan atas, kawasan tengah, dan kawasan bawah. Kawasan atas terdiri atas Kota Sabang, Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Biruen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Kawasan Tengah meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Simeulue, dan Aceh Tamiang. Sementara Kawasan Bawah terdiri atas Kabupaten Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Gayo Lues.<sup>11</sup>

Ketiga kawasan tersebut di atas mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama dari segi sosio-kultural. Kawasan atas sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir pantai timur Aceh dengan mayoritas penduduk dengan Suku Aceh. Kawasan tersebut diketahui merupakan basis Gerakan Aceh Merdeka, khususnya wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.<sup>12</sup> Berkaitan dengan Pilkada Aceh tahun 2012, tentunya ketiga kawasan tersebut menjadi rebutan bagi para calon yang bersaing, khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

## **Eksperimen Demokrasi**

### ***Pilkada Aceh 2006***

Kurang lebih satu tahun setelah penandatanganan MoU-Helsinki, pilkada secara langsung dan serentak diselenggarakan di seluruh Aceh. Pelaksanaan pilkada tersebut merupakan salah satu klausul yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pilkada Aceh merupakan eksperimen demokrasi yang sangat penting di Indonesia mengingat kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pilkada tersebut merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama di Indonesia dengan menggunakan sistem

<sup>11</sup> Moch. Nurhasim, *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, (Jakarta: LIPI, 2004). Lihat pula, Moch. Nurhasim, "Pemilu Legislatif 2004 di Aceh: Antara Intimidasi, Partisipasi, dan Mobilisasi Politik", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 66-76.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pemilihan secara langsung. Padahal selama ini setiap pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pilkada Aceh diselenggarakan sekitar bulan April 2006 dengan agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan beberapa bupati dan Wali kota berikut wakilnya. Berbagai kalangan akademisi dan pengamat, terutama pengamat politik, ketika itu meragukan Pilkada di Aceh berlangsung dengan damai. Keraguan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat Aceh baru saja lepas dari konflik yang berkepanjangan. Benih-benih konflik yang selama ini terpendam dapat saja muncul kembali dengan adanya rivalitas politik antara para pengikut calon kepala daerah yang ikut bersaing dalam pilkada.

Ada kesan Pilkada Aceh 2006 yang diperkirakan akan berdarah-darah sengaja dibesar-besarkan dan dihembuskan pihak-pihak tertentu yang tidak senang melihat Aceh damai pascapenandatanganan MoU-Helsinki. Namun, tekad menyukseskan Pilkada Aceh secara damai tidak hanya datang dari pihak TNI dan Polri, aparat pemerintah, melainkan juga datang dari masyarakat di seluruh wilayah Aceh. Mereka menyadari betul, jika dalam penyelenggaraan pilkada terjadi kekacauan maka yang pertama terkena imbasnya adalah masyarakat sendiri.

Sebagai catatan, tidak semua kabupaten dan kota mengikuti pilkada di Aceh karena ada beberapa orang bupati/Wali kota yang belum habis masa jabatannya. Ada lima pasangan calon yang mengikuti pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati/Wali kota diikuti oleh 17 pasangan. Khusus untuk calon gubernur, dua di antaranya berasal dari mantan anggota GAM, satu orang mantan pejabat gubernur, dan dua orang berasal dari purnawirawan TNI.

Sementara untuk calon bupati dan Wali kota sebagian besar diikuti oleh para mantan anggota GAM. Keikutsertaan para mantan anggota GAM dalam Pilkada Aceh merupakan salah satu klausul dalam MoU-Helsinki yang menjamin setiap warga Aceh memiliki hak untuk berpartisipasi sebagai kandidat dalam pemilihan daerah di Aceh yang diselenggarakan pada bulan April 2006 dan seterusnya.

Pilkada Aceh 2006 merupakan perhelatan akbar secara nasional dan mata dunia internasional akan melihat kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan sebuah pemilihan kepala daerah yang baru pertama dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Tidak kurang pemantau Uni Eropa secara khusus datang ke Aceh untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada tersebut agar berlangsung secara demokratis dan tanpa ada intimidasi dari kelompok manapun. Demikian juga, para pemantau nasional tidak ketinggalan ikut berpartisipasi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Aceh.

Selama masa kampanye tidak ditemukan insiden yang berpotensi menggagalkan Pilkada Aceh. Kekhawatiran yang selama ini dikemukakan ternyata tidak terjadi dalam Pilkada Aceh. Sungguh sangat menakutkan pilkada yang diprediksi akan berdarah-daerah ternyata tidak setetes darah pun tumpah di Bumi Serambi Mekkah. Masing-masing kandidat kepala daerah beserta seluruh masyarakat Aceh bahu-membahu mengawal dan mengamankan pilkada tersebut agar tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak lama setelah pemungutan suara, pada malam harinya sudah dapat diketahui hasilnya. Untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dimenangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang keduanya mantan anggota GAM. Sementara itu, dalam pemilihan bupati/Wali kota ternyata sebagian besar dimenangkan oleh pasangan yang sebelumnya pernah menjadi anggota GAM. Terpilihnya para mantan anggota GAM tersebut menjadi kepala daerah di berbagai kabupaten dan kota di Aceh secara tak langsung menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan sebuah perubahan. Hal ini kemungkinan karena selama ini masyarakat bosan dan apatis dengan pola kepemimpinan sipil yang cenderung berlaku korup.

Beberapa bupati atau Wali kota kemudian ada yang habis masa jabatannya sehingga diadakan pilkada susulan. Beberapa daerah yang melakukan pilkada susulan adalah di pantai barat Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat, juga dimenangkan oleh mantan GAM. Sebagai catatan, pilkada di Aceh Selatan berlangsung dalam dua putaran karena pada

putaran pertama tidak ada di antara calon bupati yang unggul secara mayoritas (di atas 33%).

Pilkada terakhir di Aceh diselenggarakan pada dua daerah yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam. Pilkada di Kota Subulussalam berlangsung dua putaran. Selama berlangsungnya pilkada di Aceh pada tahun 2006, hanya satu pilkada yang berakhir di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pilkada Kota Subulussalam. Kota tersebut merupakan daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.<sup>13</sup>

### ***Pilkada Aceh 2012***

Berbeda dengan Pilkada Aceh 2006 ternyata pelaksanaan Pilkada Aceh 2012 sempat mengalami penundaan hingga empat kali. Seharusnya Pilkada Aceh dapat diselenggarakan pada tahun 2011, namun adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang kehadiran calon independen telah mengakibatkan jadwal Pilkada Aceh bergeser.

Sengketa Pilkada Aceh 2012 bermula dari pencalonan Irwandi Yusuf melalui jalur independen karena Partai Aceh tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur Aceh periode 2012–2017. Untuk memperkuat pencalonan dirinya Irwandi Yusuf kemudian mengajukan gugatan ke MK. MK diharapkan akan mengkaji apakah ada celah dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) tentang keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada Aceh 2012.

Setelah melakukan kajian secara mendalam tentang gugatan Irwandi Yusuf, kemudian MK memutuskan mencabut pasal 259 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta memperbolehkan calon independen ikut berpartisipasi dalam Pilkada Aceh 2012, baik untuk pemilihan gubernur/wakil

<sup>13</sup> Tidak ada jaminan jika persoalan pilkada akan selesai dengan cepat bila dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Hasil pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, ternyata terus berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda penyelesaian sejak diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2010. Kekisruhan pilkada tersebut semakin berlarut-larut ketika keputusan MK membatalkan keputusan KPUD Kotawaringin Barat yang telah menetapkan Wali kota dan wakil Wali kota terpilih. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada tanda-tanda penyelesaian pilkada tersebut walaupun tokoh-tokoh masyarakat Kotawaringin Barat sudah turun tangan.

gubernur Aceh maupun bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. Keputusan MK tersebut mendapat tantangan keras dari Partai Aceh yang menguasai hampir separuh kursi di DPR Aceh.<sup>14</sup>

Muzakir Manaf, salah seorang petinggi Partai Aceh, mengatakan bahwa pencabutan pasal 256 UU Pemerintahan Aceh merupakan peristiwa buruk yang kemungkinan terulang kembali dan inilah sebuah wujud tidak ada jaminan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai dasar perdamaian Aceh akan berlanjut.<sup>15</sup> Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, yang juga berasal dari Partai Aceh menyatakan menolak Pilkada Aceh karena kehadiran calon independen bertentangan dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Partai Aceh yang menguasai parlemen (48%) tidak memasukkan klausul calon independen dalam Peraturan Daerah (Qanun) Pilkada Aceh. Sebagai akibatnya Qanun tersebut tidak dapat disahkan karena Pemerintah Provinsi Aceh yang notabene masih dipimpin Gubernur Irwandi Yusuf juga tidak sepakat. Kemudian Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar memutuskan memboikot Pilkada Aceh 2012 dengan tidak mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur sampai tutup masa pendaftaran calon peserta pilkada pada tanggal 7 Oktober 2011.

Seandainya Partai Aceh benar-benar menolak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi (Pilkada) Aceh 2012 tentunya merupakan kerugian besar bagi investasi demokrasi lokal. Salah satu saham demokrasi Aceh adalah partai lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia.<sup>16</sup> Terjadi kekosongan demokrasi di Aceh jika sampai Partai Aceh menarik diri dari Pilkada 2012 karena mereka menguasai hampir separo dari DPR Aceh. Seyogianya, modal partai lokal tersebut dimanfaatkan secara maksimal

<sup>14</sup> Keputusan MK No.108/PHPU.D-X/2011, tanggal 2 November 2011. Khusus untuk calon perseorangan, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun MoU Helsinki. Mahkamah hakim mengutip butir 1.2.2, MoU Helsinki tentang "Political Participation", yaitu dengan penandatanganan nota kesepahaman, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan setelahnya.

<sup>15</sup> Teuku Kamal Fasya, "Pilkada dan Lembaran Gelap Demokrasi Aceh", *Kompas*, 13 Oktober 2011

<sup>16</sup> *Ibid.*

oleh Partai Aceh untuk bertarung dalam Pilkada Aceh 2012 walaupun di dalamnya terdapat calon independen.

Setelah mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya ditemukan titik terang agar Partai Aceh dapat berpartisipasi dalam Pilkada Aceh 2012. Demi berlangsungnya Pilkada Aceh 2012 dengan damai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kemudian menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke MK terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Aceh. Rencana sebelumnya, pilkada tersebut akan dilaksanakan pada awal tahun 2012 dan ini tentunya menutup peluang Partai Aceh untuk ikut pesta demokrasi tersebut.

Sebelum Mendagri menggugat KPU, sebenarnya kalangan Partai Aceh merasa cemas karena merasa akan tersisih dalam dalam Pilkada Aceh 2012. Hal ini mengingat KIP Aceh terus menjalankan tahapan pilkada dengan alasan waktu penyelenggaraan pilkada semakin sempit, walaupun Partai Aceh tidak ikut mendaftar. Adanya lobi-lobi politik, termasuk di dalamnya menjalin kerja sama dengan PDI-P, telah menunjukkan bahwa sebenarnya Partai Aceh tidak mau kehilangan muka dalam Pilkada Aceh 2012. Adanya teror di tingkat lokal telah menambah tekanan agar Partai Aceh diberi peluang untuk berpartisipasi dalam Pilkada Aceh 2012 dengan membuka kembali pendaftaran calon peserta pilkada.

Dalam putusan selanya pada tanggal 16 Januari 2012, MK memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membuka kembali pendaftaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota yang belum sempat mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik maupun melalui jalur perseorangan. Dalam keputusan sela tersebut, MK juga memutuskan Pilkada Aceh bisa ditunda selambat-lambatnya sampai tanggal 9 April 2012.

Keputusan sela yang dikeluarkan MK tersebut disambut gembira oleh berbagai kalangan di Aceh, khususnya pihak Partai Aceh. Partai Aceh yang semula berniat menolak kemudian memutuskan untuk ikut Pilkada Aceh 2012. Pada tanggal 20 Januari 2012, Partai

Aceh mendaftarkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf ke KIP Aceh sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah ditutupnya pendaftaran oleh KIP Aceh, ada lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terdaftar maju dalam Pilkada Aceh 2012, yang terdiri atas dua pasangan diusung oleh partai politik dan tiga pasangan melalui jalur independen.

Strategi yang diterapkan Partai Aceh yang semula menolak pilkada diduga merupakan strategi mengulur waktu (*buying time*) untuk meraih simpati. Hal ini mengingat Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu legislatif yang menguasai mayoritas kursi di DPR Aceh. Kalangan petinggi Partai Aceh menyadari sepenuhnya bahwa pemerintah pusat tidak mungkin meninggalkan apalagi menyingkirkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada Aceh 2012. Seandainya Partai Aceh benar-benar tidak ikut Pilkada Aceh 2012, tentu Pemerintahan Provinsi Aceh akan banyak mengalami gangguan dan hambatan karena kursi DPR Aceh hampir separuh dikuasai oleh mantan anggota GAM yang dulunya berada di bawah komando Muzakir Manaf.

Sebagai catatan bahwa kedua Pilkada Aceh khususnya untuk pemilihan gubernur yang diselenggarakan pasca-MoU Helsinki berlangsung satu putaran. Pada saat Pilkada 2006, Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Muhammad Nazar yang ketika itu diusung Partai Aceh memenangkan pemilihan gubernur Aceh dengan jumlah suara sekitar 36%. Pada saat Pilkada 2012, ternyata pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf secara telak memenangkannya dengan jumlah suara sebesar 56%. Sementara pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju melalui jalur independen hanya meraih suara 29%.

Jika diperhatikan perolehan suara pada pemilihan gubernur Aceh 2012 ternyata bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh ternyata hanya 9 kabupaten/kota yang dapat dimenangkan pasangan Irwandi dan Muhyan Yunan, yaitu Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Banda Aceh. Hanya empat kabupaten/kota perolehan suara Irwandi dan Muhyan Yunan

yang cukup signifikan, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Banda Aceh.

Sementara itu, 14 kabupaten/kota lainnya dimenangkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan rata-rata perolehan suara lebih dari dua kali lipat dari suara yang diperoleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan. Hampir seluruh kabupaten di pesisir pantai timur Aceh memilih pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Daerah tersebut secara tradisional merupakan daerah basis Partai Aceh karena merupakan daerah konflik yang banyak melahirkan para pimpinan GAM, seperti Muzakir Manaf. Bahkan perolehan suara pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie jumlahnya lima kali lipat daripada jumlah suara yang diperoleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan.

Untuk pemilihan tingkat kabupaten dan kota ternyata karakteristiknya tidak berbeda dengan pemilihan gubernur. Calon-calon bupati yang diusung Partai Aceh unggul pada 11 kabupaten dari 18 daerah yang ikut Pilkada Aceh 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas sekaligus eksistensi Partai Aceh masih sangat kuat di Aceh. Di antara 18 kabupaten dan kota yang ikut pilkada ternyata hanya tiga kabupaten yang menyelenggarakan pilkada putaran kedua, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya.

Walaupun pemilihan gubernur Aceh 2012 berlangsung satu putaran dan dimenangkan secara telak oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, namun penetapan pemenangnya mengalami penundaan karena digugat oleh Irwandi Yusuf ke MK. Berbagai alasan yang dikemukakan, antara lain Pilkada Aceh 2012 khususnya untuk pemilihan gubernur sarat dengan intimidasi dan teror. Walaupun sebagian bukti-bukti yang diajukan Irwandi Yusuf benar, namun gugatannya untuk membatalkan hasil Pilkada Aceh 2012 ditolak oleh MK. Hal ini mengingat bahwa MK hanya berwenang memeriksa sengketa perolehan suara dalam sebuah pilkada.

## Dampak Pilkada 2012

Pilkada 2012 berbeda dengan Pilkada Aceh 2006 yang secara umum berlangsung secara damai tanpa insiden yang berarti. Walaupun sebenarnya Pilkada Aceh 2006 mengandung potensi konflik di antara sesama elite GAM, dan ini merupakan awal kekecewaan bagi elite GAM Swedia, namun perseteruan tersebut tidak sampai mencuat keluar. Dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2012, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, diwarnai dengan berbagai kekerasan dan intimidasi yang kadang dilakukan secara terbuka. Adanya rivalitas di antara sesama mantan anggota GAM yang bersaing dalam Pilkada Aceh 2012 telah mengakibatkan suhu politik di Aceh meningkat. Irwandi Yusuf yang merasa dirinya tidak diusulkan lagi menjadi calon gubernur oleh Partai Aceh kemudian mencalonkan dirinya melalui jalur independen.

Ketika mencalonkan diri, Irwandi Yusuf menyatakan bahwa hampir semua mantan panglima wilayah GAM mendukungnya.<sup>17</sup> Namun demikian, kondisi yang terjadi di lapangan terjadi tarik-menarik antara pihak Irwandi Yusuf dan Partai Aceh dalam memengaruhi massa, khususnya para mantan anggota GAM. Seperti diketahui dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan ternyata kalah telak. Walaupun sebelumnya hampir seluruh mantan panglima wilayah menyatakan mendukung Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, namun dalam kenyataannya kalangan akar rumput tidak mendukung mereka.

Selama berlangsungnya proses Pilkada Aceh 2012, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, telah menimbulkan ketidakstabilan politik di wilayah yang baru jeda dari konflik tersebut. Berbagai tindak kekerasan, teror, dan intimidasi kembali marak di Aceh. Insiden penembakan berturut-turut terjadi mulai tanggal 31 Desember 2011 hingga 5 Januari 2012 yang menewaskan 10 orang warga sipil dan sebanyak 13 orang mengalami luka-luka. Bahkan salah seorang tim sukses Irwandi yang bernama Saiful alias Cagee tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Serambi Indonesia*, "Irwandi Konsolidasi Dengan Mantan Kombatan GAM Aceh Besar", 13 Februari 2011.

<sup>18</sup> *Ibid.*



Kekerasan juga terjadi terhadap warga pendatang dengan adanya penembakan oleh orang-orang tidak dikenal. Oleh karena itu, banyak pendatang dari daerah-daerah tertentu eksodus meninggalkan Aceh. Memperhatikan kekerasan yang terjadi pada saat Pilkada Aceh 2012, kiranya hampir menyerupai kekerasan ketika terjadinya konflik Aceh antara tahun 1976–2005. Salah satu karakteristiknya adalah banyak warga pendatang yang menjadi korban. Karakteristik lainnya ialah adanya penggergajian menara-menara listrik. Dengan adanya kesamaan karakteristik kekerasan pada saat Pilkada Aceh 2012 dan konflik masa yang lalu tentu diduga pelakunya juga tidak jauh berbeda.

Meningkatnya tindak kekerasan di Aceh, Joko Suyanto selaku Menko Polhukam menyatakan berkali-kali bahwa tindak kekerasan tersebut berkaitan dengan pilkada. Dikhawatirkan konflik tersebut menjadi konflik terbuka antara para pendukung Irwandi Yusuf dengan Partai Aceh, yang notabene di bawah kendali Muzakir Manaf yang dulunya pernah menjadi Panglima GAM. Jika ini yang terjadi akan mengulang lembaran kelam sejarah Aceh karena pada awal-awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia pernah terjadi perang saudara di Aceh. Perang tersebut dikenal dengan peristiwa “Cumbok”. Pada saat itu, terjadi perseteruan antara Uleebalang (kaum bangsawan) dengan para ulama, khususnya kaum ulama muda yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Perang Cumbok terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara kaum ulama dan Uleebalang tentang Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bagi kaum ulama memaknai proklamasi merupakan sebuah momentum berakhirnya berbagai kezaliman khususnya di Aceh dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sementara itu, pihak Uleebalang melihat larinya Jepang harus segera diganti dengan Belanda dengan maksud untuk memulihkan kekuasaan tradisionalnya.

Perang Cumbok merupakan konflik di antara sesama masyarakat Aceh, tetapi sangat brutal. Perang tersebut merupakan lembaran hitam yang tidak terlupakan bagi para korban. Prof. Teuku Ibrahim Alfian, seorang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan

dalam peristiwa perang Cumbok banyak sekali keluarganya yang menjadi korban dan hingga kini kuburan mereka tidak diketahuinya. Namun Siegel menjelaskan bahwa Perang Cumbok tidak bisa dilepaskan dari konteks tatanan sosial masyarakat Aceh ketika itu. Tatanan tersebut tanpa disadari masyarakat bahwa Aceh dibangun untuk kepentingan Belanda.<sup>19</sup>

Apakah lembaran kelam yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang kembali di Aceh pascaPilkada 2012? Hal ini mengingat tipologi perseteruan Irwandi Yusuf dan Partai Aceh hampir mirip dengan penyebab pecahnya Perang Cumbok yaitu karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi dalam menafsirkan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Konflik terbuka di antara sesama mantan pemimpin GAM kemungkinan terjadi sangat kecil, terlebih hingga melibatkan para mantan anggotanya pada akar rumput. *Pertama*, mereka pernah bersama-sama berjuang melalui kekuatan bersenjata hingga terwujudnya perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. *Kedua*, Pemerintah Pusat harus tetap menjaga perdamaian Aceh karena untuk menjaga citra di mata dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang berhasil mewujudkan perdamaian tanpa kekerasan.

Van Dijk<sup>20</sup> menjelaskan bahwa akhir penyelesaian konflik di Aceh sangat berbeda dengan penyelesaian konflik di daerah lain. Penyelesaian pemberontakan Darul Islam di Aceh berakhir dengan klimaks mengingat Daud Beureueh selaku pimpinan pemberontakan, turun gunung secara sukarela dan terhormat, kemudian diampuni. Demikian pula setelah penandatanganan MoU Helsinki, semua anggota GAM, baik yang ada di penjara maupun di hutan kembali ke pangkuan ibu pertiwi tanpa ada yang dihukum. Sementara pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan Makassar berakhir setelah pimpinannya tewas ditembak pasukan TNI.

Namun, kiranya perlu dipikirkan sebuah resolusi konflik yang bersifat rekonsiliasi, terutama untuk menjembatani perbedaan persepsi antara

<sup>19</sup> T. James Siegel, *The Rope of God*, (California: University of California, 1962).

<sup>20</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiy Press, 1988).

kelompok Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf setelah Pilkada Aceh 2012. Apalagi pada saat pelantikan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur sempat terjadi pemukulan terhadap Irwandi Yusuf oleh anggota Partai Aceh.<sup>21</sup>

Pemukulan tersebut telah mengakibatkan konflik antara Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf semakin bertambah besar. Tidak lama setelah Pilkada Aceh 2012 selesai, Irwandi Yusuf mendirikan Partai Nasional Aceh (PNA) sebagai kendaraan politiknya.<sup>22</sup> Kehadiran PNA sebagai partai lokal kedua di Aceh tentunya akan meramaikan persaingan perebutan kursi di DPR Aceh antara kubu Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf pada Pemilu 2014 yang akan datang.

Perlu diperhatikan pula bahwa hasil rekaptulasi KIP Aceh di beberapa daerah putih ternyata mayoritas masyarakatnya memilih pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan. Daerah putih tersebut terdiri atas Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Subulussalam. Kelima daerah tersebut selama ini dikenal merupakan daerah yang selalu memperjuangkan berdirinya Provinsi ALA (Aceh Leuser Antara). Adanya gagasan pembentukan Provinsi ALA sangat mengganggu para elite Aceh yang menguasai Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh dengan segala upaya menentang pembentukan Provinsi ALA. Bahkan dalam MoU Helsinki terlihat adanya usaha membendung pembentukan Provinsi ALA dengan menyebutkan bahwa perbatasan Aceh kembali pada perbatasan tahun 1956.<sup>23</sup>

Sentimen-sentimen Pilkada Aceh 2012 dikhawatirkan berdampak pula terhadap kebijakan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh Pemda Aceh. Kemungkinan daerah-daerah yang tidak memilih pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam Pilkada Aceh 2012 akan mengalami pemotongan anggaran secara signifikan. Demikian pula dana otonomi khusus (otsus) yang selama ini mengalir kemungkinan dikurangi jumlahnya atau dihentikan dengan berbagai alasan. Selanjutnya,

dari segi SDM kemungkinan orang-orang yang berasal dari daerah ALA tidak diberikan peluang untuk menduduki jabatan penting di Pemerintah Provinsi Aceh.

Jika kebijakan anggaran dan SDM yang disusun Pemerintah Provinsi Aceh bersifat diskriminatif karena masalah Pilkada Aceh 2012, kemungkinan isu pembentukan provinsi baru di Aceh akan semakin kuat. Jika kebijakan-kebijakan yang tidak populer tersebut tetap dijalankan, dikhawatirkan akan mempercepat lahirnya provinsi ALA. Apalagi para pengagas ALA dan ABAS bersatu membuat sebuah *grand design* yang dapat menyatukan kedua daerah tersebut menjadi sebuah provinsi baru di Aceh. Penggabungan ALA dan ABAS menjadi nilai tawar yang tinggi dengan pemerintah pusat karena kedua daerah tersebut mempunyai SDM yang memadai dan sumber daya yang berlimpah sebagai modal pembentukan sebuah provinsi baru di Aceh.

Memperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di Aceh pasca-Pilkada tahun 2006 dan 2012 kiranya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dikaji. *Pertama*, masa depan integrasi politik dan kewilayahan Aceh. *Kedua*, eksistensi politik lokal lima tahun ke depan. *Ketiga*, hubungan antara provinsi dan kabupaten-kabupaten. Pemerintah Daerah Aceh berkewajiban menjaga integrasi politik dengan jalan merangkul semua elemen masyarakat agar bersama-sama membangun Aceh. Jangan sampai ada sekelompok masyarakat yang merasa tersingkirkan.

Selain itu, mengingat pula apa yang disampaikan Teuku Kemal Fasya bahwa salah satu saham demokrasi Aceh adalah partai lokal yang tidak dimiliki daerah lain.<sup>24</sup> Partai lokal tersebut seyogianya secara terus-menerus ditumbuhkembangkan agar iklim demokrasi semakin berkembang di Aceh. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Aceh jangan sekali-kali menjalankan roda pemerintahan dengan sistem "Aceh Centris". Artinya, orang-orang yang direkrut untuk menduduki jabatan birokrasi di provinsi harus memperhatikan aspek keterwakilan, khususnya dari berbagai suku non-Aceh, seperti Suku Gayo, Alas, Singkil, dan Simeulue.

<sup>21</sup> Kompas.com, 26 Juni 2012, diakses 28 Juni 2012.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Teuku Kemal Fasya, *Op. Cit.*, "Pilkada...".

## Penutup

Setelah penandatanganan MoU Helsinki, telah diselenggarakan dua kali pilkada di Aceh, yakni Pilkada 2006 dan Pilkada 2012. Kedua pilkada tersebut relatif berlangsung damai walaupun dalam penyelenggaraannya diwarnai dengan berbagai tindakan intimidasi dan teror. Artinya, berbagai gangguan tersebut tidak sampai menggagalkan pilkada. Semuanya merupakan proses yang cukup wajar pada masa transisi masyarakat Aceh menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Ada dua faktor yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada Aceh (2006 dan 2012) berjalan dengan damai. *Pertama*, masyarakat Aceh sudah lelah dengan konflik sehingga mereka bahu membahu mengamankan pilkada jangan sampai ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, masing-masing kelompok yang bersaing dalam Pilkada Aceh 2012 menyadari sekali bahwa mereka tidak akan menciderai MoU Helsinki yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dinamika perpolitikan Aceh untuk lima tahun ke depan bakal semakin menarik dan keras. Seperti diketahui Pemilu 2014 sudah semakin dekat dan menjadi ajang perebutan pengaruh, terutama bagi partai lokal. Hampir dapat dipastikan dua partai lokal yang sama-sama mempunyai basis kombatan GAM, yaitu Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh bentukan Irwandi Yusuf akan bertarung memperebutkan kursi di DPR Aceh. Dengan adanya dominasi dua partai lokal tersebut diperkirakan suara partai nasional semakin kecil di Aceh pada pemilu 2014 yang akan datang.

Hasil pemilu 2014 menjadi barometer bagi Pilkada Aceh pada tahun 2017. Artinya, siapa yang menguasai DPR Aceh pada pemilu 2014 maka merekalah yang unggul pada Pilkada tahun 2017. Diperkirakan situasi dan kondisi pelaksanaan pemilu 2014 akan berbeda dengan Pilkada Aceh 2012. Pemilu 2014 akan berlangsung dengan keras karena dua partai lokal berbasis GAM tidak mau kehilangan muka. Kemungkinan intimidasi dan teror akan marak lagi di Aceh menjelang pemilu 2014.

Setelah memperhatikan berbagai persoalan yang muncul pada saat berlangsungnya Pilkada

Aceh Tahun 2012, perlu didesain sebuah resolusi konflik. Hal ini dimaksudkan untuk meredakan dan meredusir potensi konflik di antara masing-masing kelompok yang pernah bersaing dalam Pilkada Aceh 2012, terutama pada akar rumput. Hal ini mengingat pemilu 2014 sudah dekat, tentu pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Aceh 2012 akan bertarung kembali. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan resolusi konflik yang perlu dilakukan, antara lain: (i) saling menghormati antara pihak yang menang dan kalah dalam Pilkada 2012; (ii) menumbuhkan rasa kebersamaan antarkelompok masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang pernah bersaing dalam pilkada untuk bersama-sama membangun Aceh; (iii) Tidak melakukan diskriminasi dalam kebijakan anggaran pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya, terutama kepada daerah-daerah yang dianggap tidak berpihak kepada calon yang menang dalam Pilkada Aceh 2012; (iv) merekrut tenaga-tenaga SDM yang berkualitas secara proporsional dari semua kabupaten/kota untuk duduk dalam birokrasi Pemerintahan Provinsi Aceh untuk bersama-sama memikirkan masa depan Aceh.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Fasya, Teuku Kemal. "Pilkada dan Lembah Gelap Demokrasi Aceh". *Kompas*, 13 Oktober 2011.
- Hurguronje, Snouck. 1906. *The Achenese*. Leiden: Late E.J. Brill, Vol. II.
- Naim, Muchtar. 1973. Merantau: Minangkabau Voluntary Migration. *Disertasi*. Singapura: Department of Sociology, University of Singapore.
- \_\_\_\_\_. 1976. "Migration Magnitude of the Minangkabau and other Ethnic Groups in Indonesia. Some Stastical Estimate". *Berita Anthropologi*. 8 (27), 18-45.
- Nurhasim, Moch. dkk. 2003. *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Jakarta: LIPI.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Pemilu Legislatif 2004 di Aceh: Antara Intimidasi, Partisipasi, dan Mobilisasi Politik", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1, No.1.

- Pemerintah Provinsi Aceh. 2012. *Hasil Sementara Rekap Hitung Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012–2017*. Banda Aceh: KIP Aceh.
- Piekar, A.J. 1949. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. S'Grevenhage: Van Hoeve.
- Siegel, T. James. 1962. *The Rope of God*. California: University of California.
- Sulaiman, Muhammad Isa. 2000. *GAM; Idiologi dan Gerakannya*. Jakarta: Grasindo.
- Thung, Ju Lan, dkk. 2006. *Penyelesaian Konflik Aceh: Aceh dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI.
- Usman Hasan. “Konflik yang Multidimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai”, dalam Musni Umar (Ed.). 2002. *Aceh Win-Win Solution*. Jakarta: Penerbit Forum Kampus Kuning.
- Van Dijk, C. 1988. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Wawer, Wendelin. 1974. *Muslimen und Christen in der Republik Indonesien*. Wiesbaden: Frans Steiner Verlag.
- Zentgraaf, H.C. 1937. *Atjeh*. Batavia

#### **B. Majalah dan Koran**

- Kompas*, 24 Februari 2011.
- Kompas*, 2 Juli 2012.
- Kompas*. 24 Juli 2012
- Kompas*, 19 Juli 2012.
- Serambi Indonesia*, 13 Februari 2011.
- Serambi Indonesia*, 26 Maret 2012.
- Serambi Indonesia*, 3 April 2012.
- Serambi Indonesia*, 24 April 2012.